



**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke – 29
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 6 Juli 2022
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.30 WIB s.d 15.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI dan secara Virtual Zoom Cloud Meeting dari tempat masing-masing
Acara	: Membahas Jaringan Kereta Api Seluruh Indonesia; Pengembangan Teknologi Kereta Api; Pemenuhan SPM Perkeretaapian; dan Kendala yang dihadapi.
Ketua Rapat	: H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E.,M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: ... Orang dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik & Virtual
Hadir Mitra	: Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Dirut PT KAI, Dirut PT KCI, Dirut PT MRT dan Dirut PT LRT beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Dirut. PT. KAI, Dirut PT. MRT, Dirut PT.KCI dan Dirut PT. LRT pada hari ini adalah membahas Jaringan Kereta Api Seluruh Indonesia; Pengembangan Teknologi Kereta Api; Pemenuhan SPM Perkeretaapian; dan Kendala yang dihadapi.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Dirut. PT. KAI, Dirut PT. MRT, Dirut PT.KCI dan Dirut PT. LRT untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, dan PT Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta agar meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendukung aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi perkeretaapian.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian untuk melakukan evaluasi terhadap program *Public Service Obligation* (PSO) serta *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO) dan *Track Access Charge* (TAC) sebagai bagian tanggungjawab negara terhadap pelayanan masyarakat utamanya pada sektor perkeretaapian, serta hasilnya disampaikan kepada Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian, PT KAI, PT KCI, PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta untuk memperhatikan masukan dan saran Komisi V DPR RI, antara lain:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan Pemda terhadap penutupan perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin;
 - b. Melakukan pengawasan secara intensif terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian, termasuk fasilitas perkeretaapian yang ramah terhadap perempuan, lansia dan disabilitas;
 - c. Melakukan kajian terhadap pengembangan jaringan perkeretaapian pada wilayah yang memiliki potensi ekonomi;
 - d. Meningkatkan integrasi dengan moda transportasi lainnya, termasuk di pelabuhan penyeberangan;
 - e. Melakukan kajian terkait rencana pemindahan Ibukota Negara;
 - f. Meningkatkan program Padat Karya Tunai (PKT) di sektor perkeretaapian.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.10 WIB.

Jakarta, 6 Juli 2022

DIRJEN PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



ZULFIKRI

PIMPINAN RAPAT,



ANDI IWAN DARMAWAN ARAS